BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan dalam negeri berupa pajak menjadi sektor yang sangat penting dan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk memberikan gambaran penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan. Salah satu bentuk pembaharuan yang mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan memberikan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini pemerintah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Semenjak reformasi perpajakan yang terjadi tahun 1983 dan berlaku efektif tahun 1984, Indonesia menggunakan struktur tarif progresif untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Tarif progresif tersebut berlaku sama, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kecenderungan global

yang terjadi adalah diterapkannya *flat rate* menggantikan tarif progresif. *Flat rate* diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menarik investasi (Sindo, 2008).

Menurut Moenaf H. Siregar (2004, 15-23) beberapa Negara di wilayah Asia telah menerapkan *flat rate*. Singapura menerapkan tarif PPh badan sebesar 22%, Malaysia 28%, Brunei 30%, Vietnam 28%, Filipina 32% dan Thailand 30%. Sedangkan Negara-negara di luar wilayah Asia diantaranya adalah Rumania dengan *flat rate* sebesar 16%. Adapun Negara yang dianggap sukses mengadopsi *flat rate* adalah Rusia dengan menerapkan *flat rate* sebesar 13%. Pemerintah merencanakan untuk melakukan perubahan antara lain PPh yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Apalagi inflasi menunjukkan angka yang relatif tinggi. Selain dari pada itu, ketimpangan dalam pembagian pendapatan dan kemajuan ekonomi yang tidak merata merupakan alasan untuk meninjau kembali tarif pajak yang menjadi faktor yang penting terhadap perhitungan pajak yang adil. Tarif PPh untuk badan telah diturunkan sebanyak tiga kali dari 35% menjadi 30% kemudian diturunkan lagi jadi 28% dan akan diturunkan lagi sekitar 25% untuk tahun neraca 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebaliknya tarif PPh pribadi dipertimbangkan untuk dinaikkan hingga lebih 50%. Sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, dan produktivitas bagi penerimaan Negara, disamping penerapan sistem *self assessment* yang lebih baik.

Bentuk pembaharuan perpajakan yang lain yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan perubahan peraturan-peraturan perpajakan, khususnya Undang-

Undang Perpajakan, yang akan meningkatkan *tax ratio* (rasio penerima pajak terhadap Produk Domestik Bruto) wajib pajak. Pemerintah telah mengeluarkan lima perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru mulai berlaku sejak 1 januari 2001 berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam hal ini penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, pemerintah akan sangat serius menanganinya karena masih banyak peluang akan potensi perpajakan yang belum banyak digali dan juga masih rendahnya kesadaran warga Negara dalam membayar pajaknya.

Wajib pajak di hampir semua Negara diwajibkan untuk melaporkan jumlah penghasilan maupun kekayaannya dalam melapor pajak yang dibuat sendiri (*self assessment*) maupun orang lain (*official assessment*). Perkembangan ekonomi, sosial, hukum, dan budaya apapun dibeberapa Negara masih banyak ditemukan laporan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi kesalahan-kesalahan baik fakta maupun yuridis fiskalnya, disengaja maupun tidak disengaja terutama di Negara yang menganut sistem pemungut pajak *self assessment* (termasuk di Indonesia). Oleh sebab itu hampir semua sistem pajak (*official assessment* dan *self assessment)*

mengatur kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan pajak terhadap laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari wajib pajak.

Ikhsan (2001) menyatakan bahwa pajak itu haruslah bersifat netral dan adil, juga tidak dibenarkan apabila membuat aturan perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap laba setelah pajak (*earning after tax/EAT*) dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang melanda kawasan Asia selama tahun 1997-1998 telah memberi dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja laba perusahaan di Indonesia. Dampak negatif tersebut terbukti antara lain dengan banyaknya kerugian fiskal signifikan dan banyaknya kasus yang ditangani Pemerintah, melalui badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN). Dampak kerugian fiskal signifikan ini menjadi salah satu komponen informasi pajak tangguhan dalam laporan keuangan auditan, karena kerugian fiskal dapat memberikan mamfaat ekonomis masa depan maksimal 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983, dan perbaikannya terakhir dengan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Undang-Undang Nomor 17).

Menurut pernyataan PSAK No. 46, mulai dengan tahun buku 1999 perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga (contoh: saham, obligasi) yang diperdagangkan kepada publik, harus mengakui dan atau mengungkapkan informasi pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Hendang Tanusandjaja (2006) menyatakan

penerapan standar baru ini membawa perubahan fundamental yang cukup signifikan, yakni:

1) Perusahaan harus mengakui adanya aktiva (kewajiban) pajak tangguhan apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur oleh standar.
2) Perusahaan harus mengungkapkan perbedaan temporer akuntansi dan fiskal, yang terdiri dari berbagai komponen utama informasi pajak tangguhan sebagai unsur pembentuk aktiva (kewajiban) pajak tangguhan.
3) Perusahaan diperbolehkan membentuk akun penyisihan penilaian (*valuation allowance*), aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan aktiva pajak tangguhan tidak dapat direalisasi (”*more likely than not”*).

PSAK No. 46 dapat dikatakan sebagai suatu metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mencoba menerapkan pendekatan neraca. Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca ini mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. Dengan berlakunya PSAK No. 46, jumlah beban pajak penghasilan yang harus diakui dilaporan laba rugi akuntansi terdiri dari beban pajak kini (*current tax expense*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*), ditambah satu unsur tambahan (bila ada) yaitu ’pajak penghasilan’ yang dapat menambah ’*net income before tax’* karena dapat dikompensasikannya kerugian fiskal.

Dari semua informasi dan analisis laporan keuanagan, investor umumnya lebih memperhatikan profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan karena tingkat *return* yang diterima oleh investor tergantung pada tingkat profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Makin tinggi laba, makin tinggi *return* yang diperoleh investor.

Dari semua informasi yang terkait dalam kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dapat dilihat dari analisis laporan keuangan. Persoalan yang sering muncul dalam masalah relevansi laporan keuangan adalah terdapat banyak pengguna laporan keuangan yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda yang biasanya dikelompokkan dalam kategori seperti investor, kreditor, manajer, pembuat peraturan, perserikatan, dan pemerintah. Dengan memahami masalah keputusan, akuntan akan lebih baik menyiapkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai pengguna.

Perusahaan pada umumnya membuat dua bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud diantaranya adalah laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Secara lebih spesifik perbedaan itu pada umunya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan waktu dan

perbedaan tetap. Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.

Masalah yang sering timbul dalam akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bahwa standar atau aturan yang digunakan dalam pelaporan akuntansi, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak.

Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi daripada laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak terutang tersebut pada periode mendatang. Namun, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah memadai untuk dapat dikompensasi dalam saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat cadangan aktiva pajak tangguhan. Sebaliknya untuk kewajiban pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer.

Unsur pajak kini terdiri dari pajak penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) tahunan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) periode berjalan (PPh Tahunan Wajib Pajak Badan), dan PPh final yang terutang atas penghasilan tertentu yang dikenai PPh selama tahun berjalan yang bersifat final. Unsur pajak tangguhan terdiri dari aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*), kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*), dan beban/penghasilan pajak tangguhan (*deffered tax*

expense/benefit. Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul:

"Pengaruh Beban Pajak Penghasilan dan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) Terhadap ROA pada Perusahaan Manufaktur di BEI"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Apakah terdapat pengaruh Beban Pajak Penghasilan terhadap ROA pada perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI?
2) Apakah terdapat pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap ROA pada perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1) Memperoleh gambaran tentang pengaruh Beban Pajak Penghasilan dengan ROA pada perusahaan manufaktur di BEI.

2) Memperoleh gambaran tentang pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dengan ROA pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.4.Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara variabel-variabel yang dalam hal ini adalah Beban Pajak Penghasilan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROA disuatu perusahaan.

2) Manfaat Praktis

   Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah wawasan mengenai pasar modal terutama mengenai Beban Pajak Penghasilan, Aktiva Pajak Tangguhan dan ROA. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan teori dimasa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1.1 Definisi Pajak

Beberapa batasan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain seperti yang dikemukakan oleh (Andriani dan Mohamad Zain, 2003: 10) mengemukakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah"

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (2005) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak dapat mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untk membayar pengeluaran umum"

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli, maka (Waluyo dan Wirawan, 2003: 5) mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diperuntukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan umtuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan kepada dan Wajib Pajak (*tax prayer*) tidak menerima atau memperoleh kontrak prestasi atau jasa timbal balik secara langsung atas pajak yang dibayarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pihak dan aspek yang terlibat dalam perpajakan meliputi pemerintah, masyarakat, aspek peraturan dan undang-undang serta aspek kepentingan umum. Semua aspek dan pihak yang terlibat harus berjalan secara harmonis sehingga target penerimaan pajak dapat terealsasi.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Rosdiana (20070, pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah memasukan dana secara optimal untuk mengisi kas Negara dengan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi Reguler

Fungsi regular atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi dalam mana pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, mendorong impor, merangsang investasi dan juga digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Oleh karenanya pajak disebut berfungsi sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah.

2.1.1.2 Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2005), pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Pajak Penghasilan dengan karakteristiknya yang sangat dominan masuk ke dalam pengelompokkan pajak langsung dengan alasan-alasan bahwa sifat dari pajak penghasilan itu sendiri masuk kedalam kelompok pajak langsung.

2.1.1.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Badan

Dalam hukum pajak internasional, Subjek Pajak itu disebut sebagai "*person*" atau orang, yang dapat berupa orang pribadi atau "*individual person"*. Subjek pajak itu adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Mansyuri menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah 1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 2) badan dan 3) bentuk usaha tetap. Fokus penelitian ini adalah subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak badan, yang dijelaskan dalan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku dalam tahun 1995 s/d tahun 2000 terdiri dari:

1. Perseroan terbatas,

2. Perseroan komanditer,
3. Perseroan lainnya,
4. Badan usaha milik Negara, dan
5. Badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
6. Persekutuan,
7. Perkumpulan,
8. Firma,
9. Kongsi,
10. Koperasi,
11. Yayasan atau organisasi sejenis,
12. Lembaga,
13. Dana pensiun, dan
14. Badan usaha lainnya.

Objek dalan hal ini adalah penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Mansyuri menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan wajib pajak badan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
2. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak, harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
3. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai salah satu bagian dari komponen Pajak Penghasilan yaitu termasuk dalam golongan pajak langsung. Artinya bahwa pemajakannya langsung ditujukan terhadap subjek yang akan menanggung beban pajak tersebut. Pajak penghasilan disebut juga pajak progresif karena dalam penerapannya mengikuti gaya pikul subjek pajak, yaitu semakin tinggi penghasilan subjek semakin besar beban pajak yang menjadi tanggungannya dengan diterapkannya tarif yang semakin meningkat sebanding dengan peningkatan penghasilan yang diterima sunjek pajak.

Sebagai salah satu dari bagian komponen pajak penghasilan, Pajak Penghasilan Badan adalah pajak-pajak yang dikenakan dan dilaporkan oleh Badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Adapun komponen penghasilan yang menjadi kewajiban sebagai badan atau BUT adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk nama apapun juga.

Sebagai konsekwensi kewajiban untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka Wajib Pajak Badan secara *voluntary* menghitung, memperhitungkan, melaporkan kewajiban pajaknya melalui media Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan jangka waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Rosdiana (2007) menjelaskan bahwa tarif adalah pajak atas lalu lintas barang. Tarif pajak didefinisikan sebagai tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan biasanya merupakan persentase untuk diterapkan atas penghasilan neto.

Nurmantu (2008) menjelaskan bahwa dalam berbagai literatur, dikenal empat macam tarif pajak yakni tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif.

1. Tarif Pajak Tetap

   Yang dimaksud dengan tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Contoh penerapan tarif pajak tetap adalah pada Bea Materai.

2. Tarif Pajak Proporsional

   Yang dimaksud dengan tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Contoh penerapan tarif pajak proporsional adalah Pajak Pertambahan Nilai.

3. Tarif Pajak Progresif

Yang dimaksud tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Contoh penerapan tarif pajak progresif Pajak Penghasilan.

4. Tarif Pajak Regresif

Yang dimaksud dengan tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah pula tarifnya. Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan

5. Tarif Tunggal

Dilihat dari karakteristiknya, tarif tunggal dapat digolongkan dalam jenis tarif proporsional. Tarif tunggal adalah bentuk tarif yang persentase tarifnya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah.

Tarif jenis ini memiliki keutamaan dalam hal kesederhanaan dan mudah di aplikasikan. Banyak pendapat para ahli mengenai kelebihan dan kekurangan tarif yang bersifat *flat* ini.

Kelebihan dari tarif proporsional ini yang menyebabkan menjadi efisien untuk digunakan:

a. Sederhana dan mudah di aplikasikan.
b. Menghilangkan pengecualian, kecuali pengecualian pribadi dan celah-celah yang dapat dipergunakan untuk meminimalkan pajak.
c. Menghilangkan Anti-*Saving* Bias.

d. Pajak tunggal akan lebih adil. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, global kompetitif, dapat meningkatkan efisiensi penagihan pajak, memudahkan dan menghemat waktu atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan akan menghentikan korupsi oleh pihak-pihak terkait.

2.1.1.4 Beban Pajak Penghasilan

Didalam laporan keuangan dijelaskan tentang akun yang memberikan jumlah agregat pajak penghasilan badan yang harus dikeluarkan untuk satu periode tahun berjalan. Beban (manfaat) pajak penghasilan akan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan, sebagai pengurang laba sebelum pajak untuk menghasilkan *net income*. Beban (manfaat) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam suatu periode tertentu.

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang atas penghasilan kena pajak periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan merupakan selisih antara saldo akhir *net*-aktiva pajak tangguhan (K) dengan saldo awal *net*-aktiva pajak tangguhan (K) yang dapat bersifat sebagai beban atau (manfaat/penghasilan)pajak tangguhan atau disebut *Deferred Tax Expense* (*benefit*) atau DTE.

2.1.2. Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pendekatan yang digunakan dalam akuntansi pajak penghasilan di Indonesia adalah pendekatan *asset laibility metod* (*balance sheet approach*) yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Selain pengakuan kewajiban pajak kini (*current tax liability*), pendekatan ini mengatur pengakuan efek pajak masa

depan (*future tax expense*) yang timbul dari perbedaan laba rugi fiskal dengan laba rugi akuntansi.

Akuntansi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 mewajibkan adanya pengakuan pajak penghasilan terhutang atau dibayar di muka atas taksiran pajak kini, yang merupakan jumlah beban pajak penghasilan terhutang atas penghasilan kena pajak periode berjalan, dan pajak tangguhan, yakni beban (manfaat) pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).

Walaupun pajak tangguhan merefleksikan konsekuensi pajak masa depan yang diakui dalam laporan keuangan, aktiva pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan (PSAK No. 46, paragraf 34). Perubahan tarif pajak penghasilan maupun perubahan ketentuan perpajakan dapat mempengaruhi realisasi atau penyelesaian atas *Deferred Tax Asset* (DTA) dan *Deferred Tax Liability* (DTL) leh karena itu, apabila terdapat perubahan tarif PPh atau perubahan ketentuan perpajakan yang secara substansial telah berlaku, maka jumlah DTA dan DTL wajib disesuaikan untuk merefleksikan perubahan tersebut (PSAK No. 46, paragraf 29).

Menurut standar ini, penyajian aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus dipisahkan dengan aktiva (kewajiban pajak kini, dan disajikan sebagai unsur tidak lancar. Demikian pula beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal wajib disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

Tabel 2.1

Terminologi Akuntansi Pajak Penghasilan

No.	Istilah	Penjelasan
1.	Beban (Manfaat) Pajak (*Tax Expense or Benefit*)	Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laporan laba/rugi suatu periode tertentu.
2.	Pajak kini ((*Deferred Tax*)	Merupakan jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang atas penghasilan kena pajak periode berjalan.
3.	Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)	Merupakan selisih antara saldo akhir *net*-DTA (L) dengan saldo awal *net*-DTA (L) yang dapat bersifat sebagai beban atau (manfaat/penghasilan)pajak tangguhan atau disebut *Deferred Tax Expense* (*benefit*)atau DTE
4.	Kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liability*, DTL)	Jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary difference* = TTD).
5.	Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*, DTA)	Jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat, antara lain : a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary difference = DTD). b. Sisa kompensasikerugian (*tax loss carry-forward*).
6.	Perbedaan Temporer	Selisih antara : a. Nilai tercatat aktiva (basis akuntansi) dengan dasar pengenaan pajak (DPP atan nilai buku fiskal) dan b. Nilai tercatat kewajiban (basis akuntansi) dengan DPP kewajiban. Selisih ini dibedakan menjadi TTD dan DTD
7.	Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Difference*, TTD)	a. Menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam menghitung laba fiskal periode mendatang. b. Menimbulkan kewajiban pajak tangguhan (DTL)
8.	Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*deductible Temporary Temporary Difference*, DTD	a. Menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam menghitung laba fiskal mendatang b. Menimbulkan aktiva pajak tangguhan (DTA).
9.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas aktiva atau kewajiban	a. Nilai aktiva atau kewajiban yang diakui dalam perhitungan laba/rugi fiskal. b. Apabila penghasilan atau beban tidak diakui secara fiskal, maka DPP = nilai tercatat.
10.	Penyisihan Penilaian Aktiva Pajak Tangguhan (*Valuation Allowance*, VA)	Jumlah taksiran yang digunakan untuk dugaan manajemen atas bagian dari DTA yang tidak dapat direalisasi berdasarkan prinsip *"more likely than not"* = penyisihan untuk mengurangi nilai DTA.

Sumber : Diolah dari PSAK No. 46 (IAI, 1997)

Perbedaan yang terjadi dalam penghitungan laba akuntansi (komersial) dengan penghitungan laba fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada Undang-undang perpajakan, sementara laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. Dalam penerapannya, Undang-undang pajak memberikan batasan yang lebih ketat dalam prinsip dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai contoh Undang-undang pajak penghasilan tidak memperbolehkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau penyisihan (Pasal 9 Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan) sementara standar akuntansi memperbolehkan perusahaan melakukan penyisihan yang didasarkan pada penilaian manajemen.

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba fiskal dengan laba rugi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan yang sifatnya tetap, artinya perbedaan ini tidak akan hilang sejalan dengan waktu. Karenanya perbedaan ini tidak akan menimbulkan biaya atau pendapatan pajak tangguhan.

Perbedaan permanen timbul dari adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final, dan adanya *non deductible expense* (biaya yang tidak boleh dikurangkan). Sebagai contoh bunga deposito, laporan keuangan komersial melaporkan bunga deposito yang diterima perusahaan sebagai penghasilan lain-lain, sementara laporan keuangan fiskal tidak

memasukkan bunga deposito ke dalam penghitungan laba fiskal karena telah dikenakan pajak secara final. Untuk biaya yang tidak dapat dikurangkan misalnya biaya sumbangan, laporan keuangan komersial mengurangkan biaya sumbangan dalam menghitung laba komersial, sementara laporan fiskal tidak pernah mengakui adanya biaya sumbangan.

2. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan biaya atau pendapatan untuk laba fiskal dan untuk laba akuntansi. Keberadaan perbedaan ini akan menimbulkan biaya atau pendapatan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan.

Perbedaan temporer yang terjadi berdasarkan Undang-undang Pajak di Indonesia adalah perbedaan dalam hal pengakuan biaya. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang mengakui pendapatan fiskal dengan basis *modified cash*, Undang-undang Pajak di Indonesia mengatur pengakuan pendapatan dengan metode *modified cash* dan akrual sebagaimana terdapat dalam definisi penghasilan berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan:

”Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Dari definisi di atas, kata ”diterima” menunjukkan penggunaan basis kas dalam pengakuan penghasilan, dan kata ”diperoleh” menunjukkan basis akrual. Penggunaan basis *modified cash* di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan fiskal dibatasi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang dalam penyusunan laporan keuangan komersialnya menggunakan basis kas.

Perbedaan temporer dibagi menjadi dua kelompok yaitu Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*) dan Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Temporary Differences*).

2.1.2.1 Perbedaan Temporer Kena Pajak

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak dimasa yang akan datang. Perbedaan temporer kena pajak dapat timbul akibat 2 hal :

1. Biaya yang diakui dalam laporan keuangan akuntansi pada suatu tahun lebih kecil daripada biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal
2. Pnghasilan yang diakui dalam laporan keuangan akuntansi pada suatu tahun lebih besar daripada penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan fiskal. (perbedaan ini tidak dimungkinkan oleh peraturan pajak Indonesia yang juga menganut akrual basis)

Contoh perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang timbul akibat masa manfaat aktiva menurut Undang-undang pajak lebih pendek dibandingkan menurut

akuntansi. Akibatnya biaya depresiasi yang diakui dalam laporan komersial akan lebih kecil dibandingkan yang diakui dalam laporan keuangan fiskal.

Efeknya dalam laporan keuangan masa kini munculnya kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liability*). Dengan demikian kenaikan kewajiban pajak tangguhan menunjukkan adanya beban pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan. Berikut skema perhitungan aktiva (kewajiban) pajak tangguhan:

2.1.2.2 Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan

Perbedaan temporer yang bolek dikurangkan adalah perbedaan temporer yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat timbul akibat 2 hal :

1. Biaya yang diakui dalam laporan keuangan akuntansi pada suatu tahun lebih besar daripada biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal
2. Penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan akuntansi pada suatu tahun lebih kecil daripada penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan fiskal

Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan yang timbul akibat penyisihan yang dilakukan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan komersial, misalnya penyisihan piutang tak tertagih. Biaya penyisihan ini akan muncul sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial, sedangkan dalam laporan keuanan fiskal tidak karena Undang-undang Pajak menganut metode *direct write off* dalam menghitung biaya piutang tak tertagih. Akibatnya biaya yang diakui dalam

laporan komersial akan lebih besar dibandingkan yang diakui dalam laporan keuangan fiskal.

Efek perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan masa kini adalah munculnya aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*). Dengan demikian, penurunan aktiva pajak tangguhan menunjukkan adanya beban pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan.

2.1.3 Profitabilitas Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Profiitabilitas

Profitabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Menurut Gitman (2003) ***"****profitability is the relationship between revenues and cost generated by using the firm's assets-both current and fixed-in productive activities"*.

Menurut IAI, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, paragraf 17, menyatakan bahwa :

"informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya".

Didalam dunia usaha, perusahaan diharapkan untuk dapat menciptakan penghasilannya secara optimal. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan (*profit*), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntunan karna disadari benar pentingnya arti dari *profi* terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan.

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukurnya adalah dengan menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat di dalam menganalisis kondisi keuangan hasil operasi dan tingkat profitabilitas perusahaan.

2.1.3.2 Metode Penghitungan Profitabilitas Perusahaan

Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terdiri atas Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) dan Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi terdiri atas Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA) dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE).

Menurut Brigham dan Houston (2006), ada empat macam rasio profitabilitas yang dapat dipergunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rasio margin laba atas penjualan (*Profit Margin on Sales*). Rasio ini mengukur jumlah laba bersih per nilai rupiah penjualan, yang diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan hasil penjualan.
b. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (*Basic Earning Power-BEP*) . Rasio ini mengindikasikan kemampuan dari aktiva-aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi, yang diperoleh dengan cara membagi keuntungan sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva.
c. Rasio tingkat pengembalian total aktiva (*Return on Assets-ROA*). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki. ROA diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva.
d. Rasio tingkat ekuitas saham (*Return on Equity-ROE*). Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik, yang diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total ekuitas saham.

2.1.3.3.*Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan anatara laba bersih dengan rata-rata tortal aktiva. Dimana rata-rata total aktiva dapat diperoleh dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. Menurut Syahyunan (2004), ”*Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.

Return on Assets bisa diperoleh dari *Net Profit Margin* dikalikan dengan *Assets Turn Over*. *Asset Turn Over* adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. *Return on Assets (ROA)* mengukur berapa persentase laba bersih terhadap total aktiva laba bersih terhadap total aktiva perusahaan tersebut.

Rumus *Return on Aseets (ROA)* adalah :

$$ROA = \frac{\text{laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan, karena

menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

2.1.4. Pajak Penghasilan dengan Profitabilitas

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara perubahan Undang-undang pajak terhadap terhadap investasi. Menurut Anwar (1995) pengaruh perubahan undang-undang pajak penghasilan akan mengakibatkan meningkatnya *internal rate of ruturn after tax*.

Penelitian dengan tujuan untuk melihat pengaruh diberlakukannya Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan pernah dilakukan sebelumnya pada pasar modal Indonesia, Radianto (2004) telah melakukan penelitian mengenai efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Kakarta (BEJ) sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang perpajakan tahun 2000. Hasil penelitian memberikan fakta bahwa secara umum pemberlakukan Undang-undang Perpajakan tahun 2000 belum dapat meningkatkan efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ

Ika (2005) melakukan penelitian pengaruh penerapan Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tehadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Kinerja perusahaan diukur dari tingkat *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin, operating profit margin, total asset turnover*, *return on investment,* dan *return on equity*. Hasil penelitian memberikan fakta bahwa secara umum terdapat

perbaikan kinerja perusahaan pasca penerapan Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

Penelitian oleh Endah Rahmi Yuanita (2006) tentang Pengaruh Beban Pajak Penghasilan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Return On Asset (ROA) Terhadap Praktik Manajemen Laba pada perusahaan publik di Indonesia menyatakan bahwa beban pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

2.1.5 Pajak Tangguhan dengan Profitabilitas

Studi mengenai hubungan pajak tangguhan dan harga saham telah banyak dilakukan, antara lain oleh Channey dan Jeter (1994), Amir dkk(1997), Ayers (1998), Hawkins (1998) Suzanne Landry (2002). Studi ini menguji hubungan pajak tangguhan terhadap harga saham, profitabilitas masa depan baik laba maupun arus kas, dan aktivitas manajemen laba dengan menggunakan sampel Perusahaan masuk bursa (PT Tbk.) di Bursa Efek Jakarta. Penelitian menyebutkan bahwa semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal.

Penelitian mengenai beban pajak tangguhan dalam kaitannya dengan prediksi manajemen laba dilakukan oleh Philips, Pincus dan Rego (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba, tentunya didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku di Amerika Serikat.

Yulianti (2004) melakukan studi mengenai hubungan beban pajak tangguhan dan investigasi manajemen laba atas sampel perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia, dengan hasil masih lemah.

Dalam penelitiannya Hendang Tanusdjaja (2006) yang menuji hubungan antara harga saham, profitabilitas masa depan, dan aktivitas manajemen laba. Secara umum studi ini menemukakan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan laba operasi dan arus kas satu tahun ke depan yang dapat diartikan sebagai memiliki kemampuan prediktif atau *value-relevance*.

Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Dewi Utari (2007)dalam mencari hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba menunjukkan hasil yang positif dan signiifikan pada hubungan antara beban pajak tangguhan dengan adanya kemungkinan perusahaan meelakukan manajemen laba untuk menghindari terjadinya kerugian. Penelitian tersebut merupakan replikasi atas penelitian Phlips, Pincus, dan Rego (2003) dengan menggunakan sampel penelitian pada perusahaan – perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta periode 2003 - 2005.

2.2. *Review* Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
Endah Rahmi Yuanita (2006)	Beban Pajak Penghasilan, Ukuran Perusahaan, Leverage, ROA sebagai variabel X. Manajemen Laba sebagai variabel Y	Teknik analisa regresi linear berganda. Uji t dan Uji F	Uji F membuktikan bahwa semua variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen
Nurma Indriyani	Restitusi Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel X. ROA sebagai variabel Y	Metode analisis deskriptif Teknik pengujian statistik yang digunakan adalah Analisis Korelasi Pearson, Uji t student, Koefisien Determinasi (Kd)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh restitusi pajak penghasilan badan terhadap return on assets adalah pengaruh yang sangat kuat dan positif

Hendang Tanusdjadja, Dkk (2006)	Pajak Tangguhan sebagai variabel X. Harga Saham, Profitabilitas, Manajemen Laba sebagai variabel Y	Model analisis regresi berganda berdasarkan data panel	Aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan semua variabel dependen

2.3 Kerangka Pemikiran

Akuntansi pajak penghasilan telah diperkenalkan di Indonesia sejak 1 Januari 1995, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 16 , par 77. Namun sejak diterbitkannya PSAK No. 46 (1997), telah terjadi perubahan orientasi dari pendekatan sebelumnya yang bersifat "*income statement approach*". PSAK No. 46 ini diterbitkan tahun 1997 dan baru berlaku efektif di Indonesia untuk tahun buku 1999 bagi perusahaan publik masuk bursa (Tbk) dan tahun buku 2001 bagi perusahaan non Tbk. Perubahan standar ini mengikuti perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat (SFAS No. 96, yang kemudian diganti dengan SFAS No. 109 dan mulai berlaku sejak tahun buku 1992) dan di Eropa (International Accounting Standard, IAS No. 12, mulai berlaku sejak tahun 1998).

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak di masa depan. Perbedaan temporer kena pajak dapat timbul akibat dua faktor, yakni :

a. Beban yang diakui dalam laporan keuangan (akuntansi) pada suatu tahun lebih kecil dari beban yang diakui dalam laporan keuangan fiskal; danpenghasilan yang diakui dalam laporan keuangan (akuntansi) pada suatu tahun lebih besar dari penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan fiskal (perbedaan ini tidak dimungkinkan oleh peraturan pajak Indonesia yang juga menganut akrual basis).

Sebagai contoh perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang timbul akibat masa manfaat aktiva menurut Undang-undang Pajak lebih pendek daripada masa manfaat aktiva menurut akuntansi. Akibatnya biaya depresiasi yang diakui dalam laporan akuntansi akan lebih kecil daripada yang diakui dalam laporan keuangan fiskal. Dampak dalam laporan keuangan masa kini adalah munculnya kewajiban pajak tangguhan menunjukkan adanya beban pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan.

b. Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang mengakibatnya berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak di masa depan. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat timbul akibat dua faktor, yakni :

1. beban yang diakui dalam laporan keuangan (akuntansi) pada suatu tahun lebih besar dari beban yang diakui dalam laporan keuangan fiskal.

2. penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan (akuntansi) pada suatu tahun lebih kecil dari penghasilan yang diakui dalam lapopran keuangan fiskal.

Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan yang timbul akibat penyisihan yang dilakukan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan (akuntansi), misalnya penyisihan piutang tak tertagih. Biaya penyisihan ini akan muncul sebagai beban dalam laporan keuangan (akuntansi), sementara dalam laporan keuangan fiskal tidak boleh diakui karena Undang-undang Pajak menganut metode *direct write-off* dalam penghitungan biaaya piutang tak tertagih. Akibatnya beban yang diakui dalam laporan (akuntansi) akan lebih besar dibandingkan dengan beban yang diakui dalam laporak keuangan fiskal. Dampak dalam laporan keuangan masa kini adalah munculnya aktiva pajak tangguhan. Dengan demikian, penurunan aktiva pajak tangguhan menunjukkan adanya bebean pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan.

Walaupun pajak tangguhan merefleksikan konsekuensi pajak masa depan yang diakui dalam laporan keuangan, aktiva pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan (PSAK No. 46, paragfraf 34). Perubahan tarif pajak penghasilan maupun perubahan ketentuan perpajakan dapat mempengaruhi realisasi atau penyelesaian atas *DTA* dan *DTL*. Wajib disesuaikan untuk merefleksikan perubahan tersebut (PSAK No. 46, paragraf 29). *DTA* timbul jika beda temporer memberikan manfaat atau penghasilan di masa depan, dengan beberapa pengecualian, seperti

negative goodwill dan pengakuan awal aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal (PSAK No. 46, paragraf 21). Dalam PSAK No 46 ini, terdapat beberapa terminologi spesifik yang wajib dipahami dalam aplikasi akuntansi pajak penghasilan.

Penjualan merupakan salah satu elemen dalam laporan Laba Rugi yang dikenakan dari segi Pajak Penghasilan (PPh). Dilihat dari sudut pandang PPh, penjualan adalah kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menghasilkan penghasilan, penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh yang nantinya pada akhir tahun harus dilaporkan oleh Wajib Pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Informasi dapat diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik oleh perusahaan. Dari semua informasi dan analisis laporan keuangan, investor umumnya lebih memperhatikan profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan karena tingkat *return* yang diterima oleh investor tergantung pada tingkat profitabilitas. Makin tinggi laba, maka tinggi *return* yang diperoleh investor.

Menurut Ayres (1994), ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek-praktek manajemen laba, yaitu manajemen akrual (*accrual management*0, penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib (*adaption of mandatory accounting chages*), dan perubahan akuntansi secara sukarela (*voluntary accounting chabges*). Di sisi lain, Scott (2000) juga mengemukakan beberapa faktor yang memotivasi terjadinya manajemen laba, antara lain adanya skema bonus, perjanjian utang, (*debt*

covenant). Motivasi politik, motivasi perpajakan, pergantian CEO, dan adanya *Initial Public Offerings* (IPO).

Seperti yang diungkapkan Scott (2000) bahwa salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Motivasi perpajakan dapat menjadi salah satu cara manjemen laba karena selain membuat laporan keuangan komersial, suatu perusahaan juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan fiskal. Kedua laporan keuangan tersebut memiliki perbedaan dalam penentuan jumlah laba yang dilaporkan. Puurba (2005) menyatakan bahwa hal itu timbul akibat adanya perbedaan antara ketentuan peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesai dalam mengakui dan memperhitungkan pendapatan dan biaya. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan perlu dilakukan proses koreksi atas laporan keuangan komersial, yang biasa disebut rekonsiliasi fiskal.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang sebelumnya telah dipaparkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Beban Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI.

H_2 : Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan penjelasan tentang apa dan atau siapa, dimana dan kapan penelitian ini dilakukan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI. Maka untuk melakukan penelitian tentang hubungan Beban Pajak Penghasilan dan Aktiva Pajak Tangguhan dengan ROA dan seberapa besar pengaruh Beban Pajak Penghasilan dan Aktiva Pajak Tangguhan dengan ROA.

3.1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia lantai II, Jl, Jendral Soedirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) adalah tempat tersedianya data atau informasi pasar modal di Indonesia yang meliputi informasi laporan keuangan yang telah *go* publik.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif karena tujuannya untuk memberikan gambaran yang sistimatis, faktual, dan akurat mengenai

laporan keuangan komersial. Untuk menguji hipotesis penelitian ini maka pengolahan datanya menggunakan alat bantu statistik SPSS.

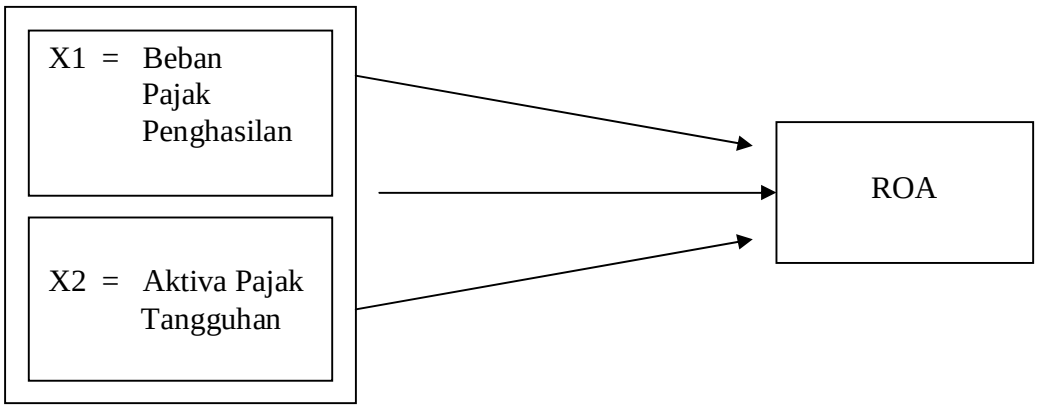
Dengan metode *Ex Post Facto* dengan pendekatan korelasioner yang bersumber pada data laporan keuangan perusahaan manufaktur go publik di BEI. Menurut Sugiyono (2007) Penelitian *Ex Post Facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian tersebut. Sedangkan penelitian korelasi adalah peneliti yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu populasi.

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk desain yang umum dipakai dalam studi korelasi sebagai berikut:

Gambar 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian



Sumber : Data dioleh oleh penulis

Keterangan :

X = Variabel bebas (PPh Badan, Deferred Tax Asset)

Y = Variabel terikat (ROA)

⟶ = Arah Pengaruh

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian (Kuncoro, 2001). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA.

***Return On Asset* (ROA)**

a. Definisi Konseptual

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan didalam mempeoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. Return on aset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan".

b. Definisi Operasional

Merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata tortal aktiva. Dimana rata-rata total aktiva dapat diperoleh dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua.

$$ROA = \frac{\text{laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen (Kuncoro, 2001). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Beban Pajak Penghasilan, Aktiva Pajak Tangguhan.

Beban Pajak Penghasilan

Merupakan jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam suatu periode tertentu.

a. Definisi Konseptual

Beban pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat tahun yang berjalan menurut peraturan perpajakan.

b. Definisi Operasional

PPh Badan = tarif wajib pajak badan X laba sebelum pajak (*earning before tax*).

Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*)

a. Definisi Konseptual

Aktiva pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansif berlaku pada tanggal neraca.

b. Definisi Operasional

Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan pada tanggal neraca.

1. Beban akuntansi > Beban fiskal atau,
2. Penghasilan akuntansi < Penghasilan fiskal

3.4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang. benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian (Suharyadi, 2004). Populasi dalam penelitian adalah perusahaan yang leasting di BEI dan populasi terjangkau adalah perusahaan manufaktur go publik yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil periode analisis pada tahun 2009. sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar diseluruh populasi, dengan melihat laporan keuangan dan neraca tahunan perusahaan industri tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Purpose Sampling*. *Purpose Sampling* yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu (Suharyadi, 2004). Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Mengambil sampel yang telah ditentukan

sebelumnya berdasarkan kepentingan dan tujuan penelitian berdasarkan kriterian. Kriterian yang telah ditentukan diantaranya adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2009 yang mencantumkan data secara lengkap berturut-turut selama periode penelitian.
2. Perusahaan sampel telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember untuk tahun 2009.
3. Perusahaan yang mengumumkan laba selama periode 2009.
4. Perusahaan yang memiliki akun aktiva pajak tangguhan.
5. Perusahaan yang memiliki akun beban pajak penghasilan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mengukur variabel x (Beban pajak penghasilan dan aktiva pajak tangguhan) dan variabel y (ROA) adalah dokumentasi yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau catatan pihak lain. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan digunakan untuk menentukan rasio beban pajak penghasilan, aktiva pajak tangguhan, dan ROA. Data sekunder adalah data yang telah dipublikasikan oleh pihak tertentu.

3.6. Metode Analisis

3.6.1 Analisis Regresi

Teknik regresi linear berganda dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti. Dengan menggunakan *software* SPSS Versi 16.00 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan diukur dengan rumus, sbb:

$$\mathbf{Ro = a + b_1PPh + b_2DT + e}$$

Keterangan

Ro = ROA Perusahaan

PPh = Pajak Penghasilan Badan

DT = Aktiva Pajak Tangguhan

e = eror

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar tiga asumsi klasik yang mendasari model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik itu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskesdastisitas (Nugroho, 2005).

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau resudual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data digunakan *normal probability plot*, yaitu deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada sebuah grafik.

Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2001, 214), sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normal.

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan analisis parametik yaitu uji normalitas data populasi. Hal ini dapat ditegaskan, bahwa suatu penelitian yang melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji-F menurut suatu asumsi yang harus diuji, yaitu populasi harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas distribusi populasi diajukan hipotesis sebagai berikut. (Sudarmanto, 2005: 105), sebagai berikut:

Ho = Data berasal dari populasi berdistribusi normal

Ha = Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi Normal.

Selain itu, uji normalitas dapat menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kaidah keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0{,}05$ dapat dikatakan bahwa data tersebut normal (Santoso: 2003 : 36).

Uji Multikoleniaritas

Menurut Algifari (2003:74), jika pada model persamaan regresi mengandung gejala *multikolinearitas*, berarti terjadi korelasi (mendekati sempurna) antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya *multikolinearitas* antar variabel bebas, salah satu caranya adalah dengan melihat dari nilai *variance inflation factor* (*VIF*) dari masing-masing variabel terikatnya, jika *VIF* tidak lebih dari 10, maka model tidak terdapat multikolinearitas. Setelah melalui perhitungan komputer dihasilkan nilai *VIF* yang lebih kecil dari 10, hal ini menunjukan tidak terjadi gejala multikolinearitas artinya tidak adanya hubungan antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *varians* dari residual dari suatu pengamatan ke pengematan lain. Jika *varians* dari suatu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika *varians* berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar pengambilan keputusan (Santoso:2001: 210), sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hipotesis yang akan diuji menurut Sudarmanto (2005, 148) dinyatakan sebagai berikut:

Ho = Tidak ada hubungan antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.

Ha = Ada hubungan antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan autokorelasi (Ghozali:2006:95). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan menurut (Yarnest:2004) sebagai berikut:

- Dw < -2 ada auto positif (+)
- -2 < Dw < +2 tidak terjadi auto
- Dw > +2 ada auto korelasi negatif (-)

3.6.3 Uji Hipotesis

Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan tentang distribusi probabilitas dari suatu variabel random, dan untuk memutuskan benar salahnya pernyataan suatu parameter, Andi (2006).

Menurut Sugiyono (2004, 51) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dengan menggunakan uji hipotesis dengan regresi linear berganda. Untuk menggunakan pengujian tersebut kita perlu memahami Analisis statistik parametrik (statistik yang bergantung pada distribusi tertentu dan yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi seperti pengujian hipotesis dan penaksiran parameter), dengan memenuhi persyaratan bahwa skala pengukuran minimal interval**,** sedangkan bila dari data penelitian diperoleh data yang memberikan skala pengukuran Ordinal (kebanyakan dalam kasus-kasus penelitian sosial), sehingga agar analisis tersebut dapat dilanjutkan maka skala pengukuran harus dinaikkan (ditransformasikan) ke dalam skala interval dengan menggunakan *Methods Successive Interval* (MSI) (www. computerstatistics.blogspot.com)

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model dependen (Ghozali, 2006:83). Uji determinasi *R*

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

b.Uji Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *Coefficient*. Nilai dari uji t dapat dilihat dari *p-value* (pada kolom sig.) pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t-hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel (dihitung dari *two-tailed a* = 5% df-k, k merupakan jumlah variabel independen –df=n-k) (Nugroho, 2005)

c. Uji Regresi Simulan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikasi F. Jika nilai signifikasi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen secara statistis mempengaruhi variabel dependen secara besama-sama. Uji regresi simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA (Nugroho, 2005).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Unit Analisis/Observasi

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan yang leasting di BEI dan populasi terjangkau adalah perusahaan manufaktur *go public* yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur yang diperoleh dari jumlah populasi terjangkau adalah 137 perusahaan. Penelitian ini mengambil periode analisis pada tahun 2009. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 56 perusahaan yang terdaftar dari seluruh populasi terjangkau, dengan melihat laporan keuangan dan neraca tahunan perusahaan industri tersebut.

Tabel 4.1
Proses Pemilihan Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode	
Penelitian yaitu tahun 2009	137
Perusahaan yang kurang lengkap dalam laporan keuangannya	(35)
Perusahaan yang mengumumkan rugi selama periode	
2009	(13)
Perusahaan yang tidak memiliki akun aktiva pajak	
Tangguhan	(27)
Perusahaan yang tidak memiliki akun beban pajak	
Penghasilan	(6)
	———
Jumlah	56

Sumber : data diolah oleh penulis (2010)

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan digambarkan/dideskripsikan dari data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal dari masing-masing variabel.

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ROA	56	-2.7061	0,96347	-5.22	-0.89
Beban Pajak	56	24.0200	2.05873	20.52	29.46
Aktiva Pajak	56	22.6338	1.78214	19.14	27.42

Sumber : data diolah oleh peneliti (2010)

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sbb:

Y = ROA

X_1 = Beban Pajak Penghasilan

X_2 = Aktiva Pajak Tangguhan

Untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik sampel yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2, dari statistik deskriptif ini dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata (*mean*) sampel, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian.

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui deskriptif statistik dari masing-masing variabel. Hasil dari pengolahan data dari 56 sampel penelitian menunjukkan bahwa nilai ROA minimum sebesar -5.22 dan maksimal sebesar -0.89 yang memiliki nilai selisih -4.33. Nilai rata-rata dari ROA sebesar -2.7061 dengan standar deviasi sebesar

0.96347. Nilai Beban pajak penghasilan minimum sebesar 20.52 dan maksimum sebesar 29.46 yang memiliki nilai selisih 8.94. Nilai rata-rata dari Beban pajak penghasilan sebesar 24.0200 dengan standar deviasi sebesar 2.05873. Nilai Aktiva pajak tangguhan minimum sebesar 19.14 dan maksimum sebesar 27.42 yang memiliki nilai selisih 8.28. Nilai rata-rata dari Aktiva pajak tangguhan sebesar 22.6338 dengan standar deviasi sebesar 1.78214.

4.2.2. Analisis Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Model regresi linear berganda dapat dkatakan sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik itu normalitas, linearitas, multikolenearitas, heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik statistik dilakukan bersama-sama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik statistik menggunakan media kotak kerja yang sama dengan uji regresi.

4.2.2.1.Uji Normalitas

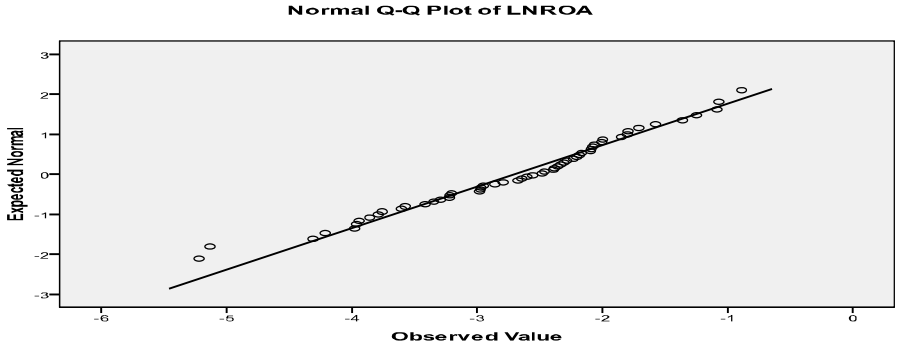
Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian ini menggunakan statistik non parametrik dengan uji *kolmagorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dengan uji *kolmagorov-smirnov* yaitu data dapat dikatakan

terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig (2-*tailed*) > 0,05. Pada uji ini dapat dilihat dari grafik normalitas dibawah ini :

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
LNROA	.092	56	.200*	.974	56	.276
LNBEBAN	.109	56	.094	.967	56	.131
LNAKTIVA	.047	56	.200*	.989	56	.882

Dari hasil *kolmagorov-smirnov* bisa dilihat bahwa hasil LN Beban, LNAktiva, memiliki hasil signifikan diatas 5%, sehingga data tersebut lolos dari uji normalitas.



Gambar 4.1
Normalitas Data

Jika residual berasal dari distribusi normal, nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus. Terlihat bahwa sebaran data pada *chart* diatas bisa dikatakan tersebar disekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencar jauh dari garis lurus) dengan demikian, bisa dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi.

4.2.2.2. Uji Multikolenearitas

Pada uji multikolenearitas atau terjadinya korelasi diantara sesama variabel bebas. Pada uji ini dapat dilihat pada tabel *coefficient* dan lihat kolom *collinearity statistic* dimodel 1 yang memperlihatkan nilai VIF < 10, pada umumnya terjadinya multikolenearitas apabila nilai VIF > 10. Berarti model ini tidak terjadi multikolenearitas.

Tabel 4.4
Uji Multikolenearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.140	1.261		-5.663	.000		
	LNBEBAN	.460	.068	.984	6.735	.000	.461	2.170
	LNAKTIVA	-.293	.079	-.542	-3.707	.001	.461	2.170

a. Dependent Variable: LNROA

Berdasarkan hasil uji model *Variance Inflation Factor* (VIF), pada hasil *output* SPSS tabel *coefficient* masing-masing variabel independent memiliki VIF tidak lebih dari 10, yaitu VIF Variabel LNBeban 2.170, LNAktiva 2.170 dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel pun tidak kurang dari 0,1, yaitu variabel LNBeban 0.461, LNAktiva 0.461. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda terbebas dari multikolenearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.2.3.Uji Autokorelasi

Pada uji ini dapat dilihat pada tabel model *summary* dimodel 1 yang nilai DWnya menunjukkan 2.188 dimana dl = 1.4988 dan du = 1.644, N = 56, k = 2, yang berarti terima Ho, tidak ada korelasi serial karena 2 < 2.188 < 2.356.

Tabel 4.5
Kriteria Pengujian Uji Autokorelasi

Nilai DW	Hasil
4-dl<DW<4	Tolak Ho, korelasi serial negatif
4-du<DW<4-dl	Hasil tidak dapat ditentukan
2<DW<4-du	**Terima Ho, tidak ada korelasi serial**
du<DW<2	Terima Ho, tidak ada korelasi serial
dl<DW<du	Hasil tidak dapat ditentukan
0<DW<dl	Tolek Ho, korelasi serial positif

4.2.2.4.Uji Heteroskedastisitas

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu meregresikan nilai residual ($LNei^2$) dengan masing-masing variabel independen (LNX_1) dan (LNX_2).

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.967	.534		1.810	.076
	LNAKTIVA	-.007	.033	-.043	-.214	.832
	LNBEBAN	-.005	.029	-.036	-.181	.857

a. Dependent Variable: ei2

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah LNBeban sebesar -0.214 dan LNAktiva sebesar -0.181. Sedangkan nilai t tabel dapat dicari pada tabel t dengan df = n-2 atau 56-2 = 54 pada pengujian 2 sisi (signifikansi 0.025), didapat nilai t tabel sebesar 2.005. karena nilai t hitung (-0.214 dan -0.181) berada pada –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima artinya pengujian antara $LNei^2$ dengan LNX_1 dan $LNei^2$ dengan LNX_2 tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.3. Analisis Regresi

4.2.3.1.Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.7
Model Summary[b]

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.479	.459	.70855	2.188

a. Predictors: (Constant), LNAKTIVA, LNBEBAN
b. Dependent Variable: LNROA

R disebut juga dengan koefisien korelasi ganda. Dapat dibaca bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel LNBeban (X_1), LNAktiva (X_2) dengan LNROA adalah sebesar 69,20%.

R *square* disebut koefisien determinasi, dari tabel dapat dibaca bahwa nilai R *square* (R^2) adalah 0,479 atau 47,90%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (LNBeban, LNAktiva) terhadap variabel dependen (LNROA) sebesar 47,90%. Sedangkan sisanya sebesar (52,10%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Adjusted R *square* merupakan nilai R^2 yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model dalam populasi. *Adjusted* R^2 dapat diperoleh sebesar 0,49816.

Std. error of the estimination merupakan kesalahan standar dari penaksiran dan bernilai 0,70855.

Keofisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 (*adjusted square*) yang diperoleh dari hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS 17.0 adalah 0,498, artinya model regresi ini dapat menerangkan bahwa LNBeban (X_1), LNAktiva (X_2), mempengaruhi LNROA (Y) sebesar 49,80% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau hal lain.

4.2.3.2.Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji regresi simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.446	2	12.223	24.346	.000[a]
	Residual	26.609	53	.502		
	Total	51.055	55			

a. Predictors: (Constant), LNAKTIVA, LNBEBAN
b. Dependent Variable: LNROA

Tabel ini menampilkan Fhitung. Uji F berguna untuk menentukan apakah model penaksiran yang digunakan tepat atau tidak. Model persamaan yang digunakan adalah model linear $Y = a + b_1LNX_1 + b_2LNX_2$, tersebut sudah tepat atau belum, Fhitung pada tabel *Anova* perlu dibandingkan dengan Ftabel. Fhitung = 24,346 dan Ftabel = 3,18.

Oleh karena Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa model linear $Y = a + b_1LNX_1 + b_2LNX_2$, sudah tepat digunakan.

Selain membandingkan Fhitung dengan Ftabel, ada cara yang lebih mudah untuk menentukan ketepatan model diatas, yaitu dengan membandingkan probabilitas (pada tabel tertulis *Sig*) dengan taraf nyatanya (0,05 atau 0,01).

Pada tabel *Anova* didapatkan hasil perhitungan nilai Fhitung sebesar 24,346. sedangkan nilai dari Ftabel dengan taraf signifikasi 5% diperoleh sebesar 3,18

(df1 = 3 – 1 = 2 dan df2 = 56 – 3 = 53). Oleh karena Fhitung > Ftabel yang artinya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi sudah tepat :

$Ro = a + b_1LNBebani + b_2LNAktivai + e$

Selain membandingkan Fhitung dengan Ftabel, ketepatan model persamaan regresi dapat dilihat dengan cara membandingkan *p-value* pada tabel *Anova* kolom Sig.) dengan taraf nyatanya. Jika *p-value* > 0,05 maka artinya tidak signifikan, tetapi jika *p-value* < 0,05 maka artinya signifikan. Berdasarkan tabel *Anova*, *p-value* 0,000 < 0,05 yang artinya signifikan, maka model persamaan regresi sudah tepat dan dapat digunakan untuk menghitung pengaruh LNBeban (X_1), LNAktiva (X_2) terhadap LNROA (Y).

Hasil output SPSS menunjukkan *p-value* 0,000 < 0,05 dan Fhitung 12,146 > Ftabel 3,18 yang berarti signifikan. Signifikan disini berarti LNBeban (X_1), LNAktiva (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap LNROA (Y).

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Endah Rahmi Yuanita dalam penelitiannya menggunakan teknik analisa regresi linear berganda. Uji F dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa beban pajak penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba.

4.2.3.3.Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji regresi parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.140	1.261		-5.663	.000
	LNBEBAN	.460	.068	.984	6.735	.000
	LNAKTIVA	-.293	.079	-.542	-3.707	.001

a. Dependent Variable: LNROA

1) Hasil Pengujian koefisien regresi variabel Beban Pajak Penghasilan

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji parsial t_{hitung} variabel Beban Pajak Penghasilan (X_1), diperoleh t_{hitung} = 6.735 dengan signifikansi t sebesar 0,000 < α0.05. Tabel distribusi dicari pada uji 2 sisi dengan derajat kebebasan 53. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2.006; karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara beban pajak penghasilan dengan ROA Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Beban Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan manufaktur di BEI.

2) Hasil Pengujian koefisien regresi variabel Aktiva Pajak Tangguhan

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji parsial t_{hitung} variabel Aktiva Pajak Tangguhan (X_2), diperoleh t_{hitung} = -3.707 dengan signifikansi t sebesar 0,001 < α0.05. Tabel distribusi dicari pada uji 2 sisi dengan derajat kebebasan 53. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2.006; karena -t hitung < -t tabel maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara aktiva pajak tangguhan dengan

ROA. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan manufaktur di BEI.

4.3. Interpretasi Hasil

Dari pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh koefisien untuk masing-masing variabel independen dengan model persamaan yang digunakan adalah model regresi linear berganda

$$Y = -7.140 + 0.460LNX_1 - 0.293LNX_2$$

Dilihat dari persamaan model regresi linear berganda di atas bahwa, variabel beban pajak penghasilan berbanding lurus dengan ROA. Ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara beban pajak penghasilan dengan profitabilitas yang diperoleh setelah mulai diberlakukannya pajak penghasilan badan yang lebih kompetitif untuk mengkondisikan portofolio para investor dalam menanamkan modalnya, salah satunya terkait dengan regulasi perpajakan. Sedangkan untuk variabel aktiva pajak tangguhan berbanding terbalik dengan nilai variabel ROA. Hal ini mengisyaratkan bahwa penundaan pembayaran pajak penghasilan terhutang yang timbul akibat perbedaan antara sistem akuntansi komersial dengan peaturan fiskal, tidak serta merta akan menaikkan return yang diperoleh yang digambarkan dalam model persamaan memiliki hubungan negatif. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, adanya penambahan aktiva pajak tangguhan sebagai asset tidak lancar dalam laporan keuangan perusahaan dan dari operasional variabel maka akan terjadinya penurunan tingkat profitabilitas yang dihasilkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dua variabel independen yaitu Beban pajak penghasilan, Aktiva pajak tangguhan jika diteliti menggunakan uji t, maka hasil yang diperoleh dari penelitian adalah variabel Beban pajak penghasilan dan Aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya ROA dengan tingkat signifikan 5%.
2. Pengaruh pengukuran Beban pajak penghasilan, Aktiva pajak tangguhan terhadap ROA pada perusahan yang melakukan Aktiva pajak tangguhan relatif cukup kecil. Nilai R *square* (R^2) adalah 0,452 artinya 45,20% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya ROA disebabkan oleh variabel LNBeban, LNAktiva. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau hal lain. Nilai R *square* yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan kedua pengukur ROA dalam menjelaskan fenomena ROA masih rendah, yang berarti masih banyak faktor diluar persamaan yang akan mempengaruhi ROA perusahaan dalam meminimalisir beban pajak penghasilan dan melakukan aktiva pajak tangguhan.

3. Beban pajak penghasilan memiliki hubungan positif dengan ROA, yang mengindikasikan bahwa adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan akan memberikan nilai yang lebih kompetitif terhadap return yang menjadi dasar para investor untuk menanamkan modalnya. Sedangkan untuk aktiva pajak tangguhan bertolak belakang dengan capaian nilai profitabilitas, karena pada dasarnya kenaikan jumlah aktiva pajak tangguhan menyebakan bertambahnya jumlah asset perusahaan yang menjadi dasar perhitungan dalam memperoleh ROA pada perusahaan manufaktur.
4. Penelitian menggunakan uji F, Beban pajak penghasilan dan Aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan ROA. Teori yang diungkapkan oleh Endah Rahma Yuanita dan Hendang Tanusandjaja yang menyatakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan secara simultan antara Beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan terhadap Profitabilitas.

5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini hanya digunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan manufaktur dan bukan manufaktur penilitian ini tidak dapat mewakili keadaan seluruh perusahaan Indonesia. Elemen-elemen laporan keuangan yang tidak sama dan perbedaan kegiatan usaha berpengaruh pada perhitungan profitabilitas, beban pajak penghasilan, dan aktiva pajak tangguhan. Oleh

karena itu, pada penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel pada perusahaan selain manufaktur atau keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI.

2. Dari keterbatasan yang ada, maka untuk penelitian berikutnya disarankan dapat menambahkan variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian. Dalam hal ini pajak tangguhan memiliki dua jenis salah satunya adalah kewajiban pajak tangguan dan untuk variabel dependen agar lebih diperluas lagi sebagai tolak ukur tingkat profitabilitas perusahaan untuk penyempurnaan penelitian, menggunakan pengamatan jenis industri yang lain, dan memperpanjang jumlah tahun pengamatan guna mendapatkan hasil yang konsisten untuk memperoleh hasil penelitian.
3. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Idealnya untuk tarif pajak saat ini agar lebih kompetitif dengan negara-negara lain terkait dengan usaha pemerintah untuk menarik para investor untuk berinvestasi, selain itu juga meningkatkan penerimaan wajib pajak badan.
4. Perekonomian negara salah satunya berasal dari pajak. Perekonomian akan berjalan lancar apabila infrastruktur pemerintah dalam menyediakan fasilitas dapat dijalankan dengan baik. Sumber utama dari infrastruktur pemerintah bersumber dari pajak. Maka disarankan untuk tercipanya suatu perekonomian

yang baik dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban pajak dengan tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukna pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, edisi 10, Penerbit Salemba Empat

Deviana, Birgita S.P., *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings.* www.undip.ac.id

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Perpajakan* .www.dirjenpajak.go.id

Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Indonesia Stock Exchange. *Daftar Perusahan-perusahaan yang leasting di Bursa Efek Indonesia*. www.idx.co.id

Indriyani, Nurma. 2004. *Pengaruh Restitusi Pajak Penghasilan Badan Terhadap Return On Asset pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).* (www.elib.unikom.ac.id).

Ismail, M. Nur. 2010. *Memaksimalkan Hasil Kebijakan Pajak*. Indonesian Tax Review, Volume II, edisi 21, hlm, 67.

Mardiasmo. 1999. *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 6.

Muhammad Mar'ie. 2005. **Harian Bisnis Indonesia**.

Muttaqin, Zaenal. 2008. *Insentif Pajak Buat Pengusaha Kecil*. **Sindo** : Jakarta.

Natali, Christine. 2006. *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kebijakan Dividend dan Struktur Modal Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 1998-2005*.

Nugroho, Bhuono Agung.2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Granit.
Penerbit Salemba Empat.

Prayitno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*, Jakarta : Penerbit Mediakom.

R. Mansyuri. 2000. *Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan*, Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hlm. 7-9.

Ramadhan, Wina. 2009. *Kebijakan Penerapan Flate Rate pada Pajak Penghasilan Badan*. (www.digilib.ui.ac.id).

Rosdiana, Haula dan Tarigan Rasin. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Penerbit Rajagrafindo Utama, hlm. 40.

Siregar, Moenaf H. 2004. *Rencana Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 3, Nomor 12, hlm. 15-23.

Suranggane, Zulaikha. 2007. *Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba : Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 4, Nomor 1, hlm. 77-94.

Susilo, Iwan Saktius. 2007. *Pengaruh Tarif Tunggal Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang : Studi pada KPP Pangkal Pinang*. Tesis, Fisip UI.

Tanusdjaja, Hendang. 2006. *Hubungan Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba*. *Tesis*. Fe UI.

Universitas Negeri Jakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi* Universitas Negeri Jakarta. Jakarta : FE Universitas Negeri Jakarta, 2008.

Utari, Dewi. 2007. *Analisis Hubungan Beban Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba*. Tesis. Fe UI.

www.indoskripsi.com. 2010. *Analisis Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEJ Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Perpajakan Tahun 2000.*

Yulianti. 2004. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Mendeteksi Manajemen Laba*. Tesis. Fe UI.

Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, edisi 3, Jakarta :

Lampiran 1 Daftar Nama Sampel Perusahaan

No	NAMA PERUSAHAAN
1.	EVER SHINE TEX
2.	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
3.	SEMEN GRESIK (PERSERO)
4.	ARWANA CITRA MULIA
5.	SURYA TOTO INDONESIA
6.	BETONJAYA MANUNGGAL
7.	CITRA TUBINDO
8.	JAYA PURI STEEL
9.	LION METAL WORKS
10.	LIONMESH PRIMA
11.	PELAT TIMAH NUSANTARA
12.	PELANGI INDAH CANINDO
13.	BUDI ACID JAYA
14.	EKADHARMA INTERNATIONAL
15.	ETERINDO WAHANATAMA
16.	INDO ACIDATAMA
17.	BERLINA
18.	DYNAPLAST
19.	YANAPRIMA HASTAPERSADA
20.	SEKAWAN INTIPRATAMA
21.	JAPFA COMFEED INDONESIA
22.	MALINDO FEEDMILL
23.	SIERAG PRODUCE
24.	SUPARMA
25.	ASTRA INTERNATIONAL
26.	GAJAH TUNGGAL
27.	GOODYEAR INDONESIA
28.	INDOSPRING MULTI PRIMA SEJAHTERA
29.	PAN BROTHERS
30.	RICKY PUTRA GLOBALINDO
31.	RODA VIVATEX
32.	BUMI INDO KABEL
33.	DELTA DJAKARTA
34.	MAYORA INDAH
35.	MULTI BINTANG INDONESIA
36.	PRASHIDA ANEKA NIAGA
37.	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD
38.	ULTRAJAYA MILK INDUSTRI & TRADING COMPANY

39.	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA
40.	TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA
41.	DARYA-VARIA LABORATORIA
42.	KIMIA FARMA (PERSERO)
43.	MERCK
44.	PYRIDAM FARMA
45.	TEMPO SCAN PACIFIC
46.	SCHERING-PLOUGH INDONESIA
47.	MANDOM INDONESIA
48.	MUSTIKA RATU
49.	KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL
50.	INDOFOOD SUKSES MAKMUR
51.	INDAL ALUMUNIUM INDUSTRY
52.	KALBE FARMA
53.	AQUA GOLDEN MISSISIPI
54.	HOLCIM INDONESIA
55.	ASTRA OTOPARTS
56.	UNILEVER INDONESIA

Lampiran 2 Pengujian Hipotesis dengan SPSS

Uji Autokorelasi

Lampiran 3 Laporan Keuangan Perusahaan